

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya permasalahan sosial selalu ada dan terus berkembang di dalam masyarakat. Salah satu persoalan kesejahteraan sosial yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat adalah tindakan menyelenggarakan dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku.¹

Peneliti melihat adanya permasalahan yang berkaitan dengan anak. Saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan kota Bandung. Peneliti melihat tidak sedikit anak terlantar yang terjaring oleh Satpol PP Kota Bandung yang kemudian diserahkan ke UPT Puskesmas Kota Bandung untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Berdasarkan data jumlah klien UPT Puskesmas Kota Bandung periode Januari-April 2020, kategori anak terlantar dan anak jalanan berjumlah sebanyak 31 orang dan anak dalam kedisabilitas (ADK) sebanyak 4 orang. Selain itu, tidak jarang pula adanya balita yang dijadikan alat untuk mendapatkan simpati masyarakat diantaranya adalah untuk mengemis. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada 16 Juli 2018 menyebutkan jumlah anak terlantar di Jawa Barat mencapai 135,787anak.

Adanya anak terlantar tidak lain adalah akibat dari kondisi ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan kurangnya kemampuan bertahan di lingkungan sosial. Kemiskinan dan pemiskinan menjadi efek yang penting munculnya permasalahan dalam keluarga yang menjadikan anak sebagai korban.² Permasalahan anak terlantar ini menjadi

¹ Adi fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 80.

² Arfiansyah Panji Purwandar, "Kemiskinan dan Pemiskinan Faktor Menjamurnya Anak Terlantar Menjadi Anak Jalanan", <https://jogja.tribunnews.com/amp/2016/10/13/kemiskinan-dan-pemiskinan-faktor-menjamurnya-anak-terlantar-menjadi-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

hal yang mengkhawatirkan, sebab anak seharusnya mendapatkan perlindungan serta kehidupan yang baik. Seorang anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa ditinggalkan ataupun diterlantarkan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa:9)

Dari ayat di atas, kita mendapatkan penjelasan bahwa anak terlantar harus mendapatkan bantuan perlindungan dari orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Kemudian anak-anak tersebut harus mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hak-hak tersebut dapat berupa kasih sayang, pendidikan, maupun aspek material.

Dalam menghadapi permasalahan sosial anak terlantar, pemerintah yang berperan sebagai salah satu pemegang kebijakan negara memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 22 menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 (1) menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang

tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dan Pasal 23 (2) negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.³

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses penyelesaian permasalahan sosial ini peneliti melihat sebuah lembaga yang berperan atau berusaha untuk melakukan perlindungan bagi anak-anak terlantar. Dari kondisi anak yang kehilangan keluarganya, lembaga tersebut berusaha anak-anak mendapatkan dan merasakan kembali bagaimana memiliki sebuah keluarga, sehingga mereka tidak merasa sendiri.

Untuk mengkaji fenomena tersebut, penulis memfokuskan kajian pada peran *Save Our Soul Children's Village* Lembang yang merupakan sebuah lembaga sosial sekaligus mitra pemerintah yang ikut membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak terlantar. Lembaga sosial ini dengan berbagai programnya menarik untuk dikaji sejauh mana peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak-anak terlantar.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya penyalahgunaan dan tindakan kriminal yang terjadi pada anak terlantar.
2. Banyaknya anak terlantar yang terjaring oleh Satpol PP Kota Bandung yang diserahkan ke UPT Puskesmas Kota Bandung untuk mendapatkan pembinaan.

³ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 128.

3. Rentannya aspek perekonomian menjadi salah satu faktor munculnya anak terlantar.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun tiga rumusan masalah, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam upaya perlindungan anak dibidang sosial?
2. Bagaimana keikutsertaan anak-anak di *Save Our Children's Village* Lembang?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam melakukan perlindungan anak dibidang sosial?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam upaya perlindungan anak dibidang sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan anak-anak di *Save Our Children's Village* Lembang.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat bagi *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam melakukan perlindungan anak dibidang sosial.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dengan diangkatnya penelitian ini, ada beberapa hal yang dipandang dapat melahirkan manfaat, baik itu secara akademis maupun praktis, berikut adalah penjelasannya:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan kajian proses peningkatan kesejahteraan, upaya peningkatan wawasan, informasi serta pengetahuan tentang kontribusi lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana lebih spesifiknya adalah dalam melakukan perlindungan anak dibidang sosia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengambilan atau penentuan kebijakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah yang ada di daerah sekitar dalam upaya memahami peran *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam keikut sertaan membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang cukup sulit untuk diatasi selama ini. Selain itu, guna memberikan informasi kepada lembaga kesejahteraan sosial terkait hal apa yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan sarana pendukung untuk meningkatkan upaya memsantu kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis objek kajian dengan menggunakan teori Robert K Merton yaitu mengenai Fungsionalisme Struktural. Menurut Merton, objek analisis sosiologi meliputi fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pengendalian sosial, organisasi kelompok dan beberapa fakta sosial lainnya. Konsep ini memusatkan perhatian pada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain.

Fungsionalisme structural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lain. Apabila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian yang lainnya.

Merton menjelaskan bahwa teori tersebut mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian diri dari sistem tertentu. Merton mengembangkan gagasan tentang disfungsi. Konsepnya tentang disfungsi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Merton membedakan fungsi menjadi dua, yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan.⁴ Merton menjelaskan pula bahwa akibat yang tak diharapkan tidak sama dengan fungsi laten. Struktur mungkin bersifat disfungsi untuk sistem secara keseluruhan, namun struktur tersebut masih dapat bertahan hidup.

⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta:CV Rajawali, 1985), hlm. 26.

Dalam penelitian ini, konsep fungsionalisme struktural yang digagas oleh Merton akan diterapkan sebagai berikut:

Pertama, fungsi merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam sesuatu sistem. Dalam hal ini fungsi dari lembaga pengasuhan anak SOS *Children's Village* Lembang dibentuk sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak terlantar yang didukung dengan beberapa program sebagai bentuk penyesuaian agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

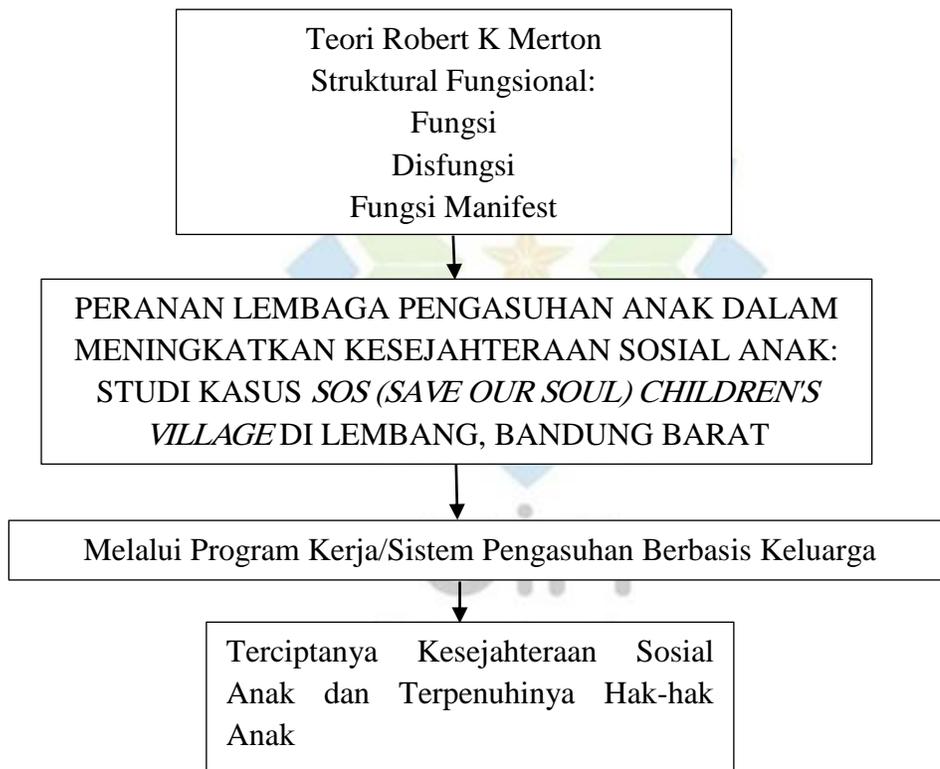
Kedua, disfungsi sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem. Dalam hal ini membahas peranan lembaga pengasuhan anak yang apabila kesejahteraan anak terlantar tidak terpenuhi maka dikatakan telah terjadi disfungsi pada struktur sosial ini.

Ketiga, fungsi manifest ketika sesuatu yang dikehendaki penuh dengan rencana yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Lembaga pengasuhan anak melalui peranannya dengan didorong oleh program yang digagas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar dapat membantu anak-anak yang sebelumnya terlantar dijalanan memiliki keluarga, mendapatkan kasih sayang layaknya anak pada umumnya, dan terpenting hak-hak yang menjadi hak anak didapatkan oleh mereka.

Keempat, fungsi laten yang terjadi pada keadaan yang tidak dikehendaki atau hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini yaitu terjadi hal yang tidak diinginkan adalah ketika anak-anak tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga guna meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

Kelima, keseimbangan (equilibrium), dengan melihat keadaan yang terjadi dapat dilakukan penyeimbangan mengenai pola-pola ataupun tahapan-tahapan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan sehingga dapat menemukan jalan keluar atau penyelesaian agar terjadi keseimbangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian